



Membangun Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Sistem Kesehatan Indonesia

Almeria Annisa Putri ^{1*}, Saula Bellatrix Lumbantobing ², Riswandy Wasir ³

¹⁻³ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: almeria718@gmail.com

Abstract. Corruption in the health sector undermines efficiency and reduces the quality of public services. This study aims to analyze the current level of transparency and accountability in Indonesia's health system governance, identify key challenges, and formulate strategies for improvement. A literature review was conducted using five selected scientific articles from national and international databases published between 2016 and 2025. The findings reveal that weak policy implementation, limited cross-sector coordination, and inadequate understanding of accountability frameworks remain significant barriers. Proposed strategies to improve governance include digitalizing procurement through e-Procurement systems and enhancing community participation in monitoring healthcare services. The adoption of technology-based systems is considered effective in promoting transparency, reducing budget inefficiencies, and strengthening public trust. Therefore, sustainable health governance reform must be supported by improving human resource capacity and increasing health literacy at the community level to build a more transparent, accountable, and responsive health system..

Keywords: Accountability, Community Participation, Health Digitalization, Health Governance, Transparency

Abstrak. Korupsi di sektor kesehatan melemahkan efisiensi dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sistem kesehatan Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama, serta merumuskan strategi perbaikannya. Metode yang digunakan adalah kajian literatur terhadap lima artikel ilmiah yang dipilih dari database nasional dan internasional dalam rentang tahun 2016 hingga 2025. Hasil studi menunjukkan bahwa lemahnya implementasi kebijakan, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan rendahnya pemahaman terhadap kerangka akuntabilitas menjadi hambatan utama. Strategi yang diusulkan mencakup digitalisasi proses pengadaan melalui sistem e-Procurement serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan kesehatan. Penerapan sistem berbasis teknologi dinilai efektif dalam meningkatkan transparansi, mengurangi inefisiensi anggaran, dan memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, reformasi tata kelola kesehatan yang berkelanjutan perlu didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi kesehatan masyarakat guna mewujudkan sistem kesehatan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif.

Kata kunci: Akuntabilitas, Digitalisasi Kesehatan, Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Kesehatan, Transparansi

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan tindakan tercela yang dapat merugikan banyak pihak, termasuk negara dan masyarakat. Tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat berwenang, tetapi juga oleh berbagai kalangan profesi, termasuk tenaga kesehatan (Juwita, 2023). Menurut temuan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sektor kesehatan selama satu dekade terakhir, alat kesehatan masih menjadi komoditas yang paling banyak dikorupsi. (Ayuningtyas et al. 2018) Tidak tersedianya standar, variasi spesifikasi yang sangat banyak, serta inovasi yang cepat menyebabkan alat kesehatan rentan untuk dikorupsi (Bintang, 2024).

Pengaruh korupsi dalam pelayanan kesehatan dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Transparansi mengandung makna bahwa ada

jaminan akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan lainnya, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. (Melita et al. 2019)

Namun kurangnya transparansi dalam kebijakan kesehatan turut berkontribusi terhadap inefisiensi dan potensi terjadinya korupsi (Sulfiani & Reski, 2019). Minimnya keterbukaan informasi membuat pengawasan oleh masyarakat dan lembaga terkait menjadi sulit, sehingga praktik-praktik korupsi dapat berlangsung tanpa terdeteksi. Defisit yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagian disebabkan oleh kecurangan dan inefisiensi dalam pengelolaan dana jaminan sosial, pada tahun 2018 diproyeksikan mencapai Rp 11,6 triliun (Annisa et al. 2020).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peningkatan akuntabilitas melalui digitalisasi dan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis (Rokhmawan et al. 2017). Implementasi e-katalog dan e-purchasing dalam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan dapat meminimalisir peluang korupsi dengan memastikan transparansi harga dan spesifikasi barang. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan pelayanan kesehatan dapat meningkatkan akuntabilitas penyedia layanan dan mendorong perbaikan kualitas layanan kesehatan. (Annisa et al. 2020). Berdasarkan hal tersebut, kajian literatur diperlukan untuk mensintesis bukti ilmiah dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem kesehatan guna mewujudkan tata kelola sistem kesehatan yang berkualitas.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis (1) tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sistem kesehatan Indonesia saat ini; (2) faktor yang menjadi penghambat peningkatan akuntabilitas di sektor kesehatan; (3) strategi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem kesehatan.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi *literature review* atau kajian literatur. Kajian literatur ini menggunakan 5 artikel ilmiah yang dijadikan sebagai bahan referensi

utama dalam penelitian ini. Penelusuran jurnal internasional melalui Science Direct menggunakan kata kunci “(Accountability) AND (Community Participation) AND (Health Digitalization) AND (Health Governance) AND (Transparency)”. Pencarian jurnal nasional dilakukan melalui Google Scholar menggunakan kata kunci “(Akuntabilitas) AND (Digitalisasi Kesehatan) AND (Partisipasi Masyarakat) (Transparansi) AND (Tata Kelola Kesehatan)”. Pencarian artikel difokuskan pada publikasi dalam rentang tahun 10 tahun terakhir, yaitu antara tahun 2016-2025. Metode ini mengandalkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat untuk memastikan sumber yang digunakan dalam penelitian ini relevan dan berkualitas.

Hasil pencarian dengan kata kunci didapatkan 15 artikel dari database Science Direct, 560 artikel dari database Google Scholar, dengan total 575 artikel. Selanjutnya, dilakukan penyaringan artikel berdasarkan duplikasi artikel menggunakan aplikasi Mendeley yang ditemukan sejumlah 22 artikel. Artikel yang diperoleh diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Terdapat 5 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan sejumlah 765 artikel dieksklusi berdasarkan abstrak dan judul maupun isi artikel secara keseluruhan. Kriteria inklusi mencakup artikel yang tersedia dalam full text, diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup duplikasi artikel yang tidak relevan dengan topik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil ekstraksi dari 5 artikel yang diperoleh dengan kata kunci maupun topik yang telah ditentukan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil *Literature Review*

No	Peneliti, Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Sulfiani & Reski, 2020)	Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas pelayanan pegawai di Kantor BPJS Kesehatan Kota Palopo masih perlu ditingkatkan guna meminimalisir keluhan dari peserta. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar mereka memahami peraturan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

2.	(Yuliyanti & Terzaqhi, 2023)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin	Kuantitatif	Akuntabilitas dan transparansi terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
3.	(Andayani et al., 2020)	Akuntabilitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Di Kabupaten Maros	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan kesehatan di RSUD Salewangang, Kabupaten Maros, mencakup empat dimensi utama. Akuntabilitas hukum dan kejujuran dinilai telah berjalan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, akuntabilitas proses belum optimal karena implementasinya belum sesuai standar. Akuntabilitas program tergolong baik dan bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas kebijakan juga telah diterapkan secara tepat, dibuktikan dengan tidak adanya keluhan dari petugas terkait ketentuan atau kebijakan rumah sakit.
4.	(Nurimansyah, & Kamal, 2022)	Transparansi Informasi Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kota Palopo	Random Sampling	Penelitian ini menggunakan lima indikator transparansi, yaitu keterbukaan rapat, informasi, prosedur, register, dan penerimaan terhadap partisipasi masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa responden menilai transparansi informasi layanan BPJS Kesehatan Kota Palopo sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, transparansi tersebut

				masih perlu ditingkatkan agar masyarakat benar-benar merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.
5.	(Wijayanti & Ardana, 2021)	Implementasi <i>Electronic Procurement</i> Dalam Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan Di RSUD Kabupaten Buleleng	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan sistem E-Procurement di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng berhasil meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan alat kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Melalui aplikasi E-Purchasing, prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi diimplementasikan dengan baik, sehingga proses pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan finansial. Penerapan E-Procurement ini juga memberikan dampak positif berupa efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan waktu serta anggaran.

Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Sistem Kesehatan Indonesia

Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sistem kesehatan di Indonesia masih menjadi sorotan penting dalam upaya memperbaiki mutu pelayanan publik. (Fukami, 2024) Penelitian pada Kantor BPJS Kesehatan di Kota Palopo menunjukkan bahwa kurangnya akuntabilitas dari petugas layanan menyebabkan meningkatnya keluhan masyarakat, khususnya terkait keterlambatan pelayanan dan ketidakjelasan informasi hak peserta (Sulfiani & Reski, 2019). Data Komisi Ombudsman Republik Indonesia tahun 2022 juga menunjukkan bahwa sektor kesehatan menempati urutan ketiga tertinggi dalam laporan pengaduan publik, dengan persentase keluhan mencapai 14,5% dari total laporan (Ombudsman RI, 2022). Minimnya sosialisasi terhadap regulasi dan prosedur pelayanan kesehatan turut memperparah ketimpangan pemahaman antara penyedia layanan dan pengguna. (Nurimansjah & Kamal, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas

tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab administratif, tetapi juga menyangkut komunikasi aktif dan keterbukaan informasi kepada publik agar layanan kesehatan dapat diakses secara adil dan setara.

Sebaliknya, hasil penelitian di Puskesmas Sukajadi, Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas secara serius berdampak positif terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). (Lestari, 2024) Transparansi dalam pelaporan penggunaan dana, keterlibatan lintas sektor dalam perencanaan, serta audit internal secara berkala berkontribusi besar terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan layanan kepada masyarakat (Yulianti & Terzaqi, 2023). Selain itu, laporan Kementerian Kesehatan tahun 2023 mencatat bahwa puskesmas yang menerapkan prinsip pelaporan terbuka mengalami peningkatan kepuasan masyarakat hingga 18% dibandingkan tahun sebelumnya (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Temuan ini membuktikan bahwa ketika prinsip akuntabilitas dijalankan melalui mekanisme pelaporan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, kepercayaan publik pun meningkat dan pelayanan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya indikator administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan publik. Lemahnya akuntabilitas cenderung menciptakan birokrasi yang tertutup dan rawan penyimpangan, sedangkan tingginya transparansi menciptakan ruang kontrol publik yang sehat. (Sulistiyani et al. 2014). Oleh karena itu, pemerintah dan institusi kesehatan perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat, serta mendorong mekanisme pelaporan yang mudah diakses sebagai langkah konkret dalam membangun sistem kesehatan yang lebih jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.

Faktor Yang Menjadi Penghambat Peningkatan Akuntabilitas di Sektor Kesehatan

Peningkatan akuntabilitas di sektor kesehatan sering kali terhambat oleh berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pelayanan. Berdasarkan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang, Kabupaten Maros, ditemukan bahwa aspek akuntabilitas hukum dan kejujuran telah berjalan cukup baik, namun akuntabilitas proses masih belum optimal, terutama dalam hal penerapan prosedur operasional standar yang konsisten (Andayani, Setiawati, & Haerana, 2020). Salah satu faktor utama penghambat adalah adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan, di mana banyak prosedur administratif yang tidak dijalankan secara efektif sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kesehatan.

Selain itu, hasil studi Latief et al. (2023) menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi dan koordinasi antar lintas sektor menjadi hambatan krusial dalam meningkatkan akuntabilitas (Latief et al. 2023). Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa sekitar 62% responden menyatakan tenaga pengelola di fasilitas kesehatan masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Di sisi lain, keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan SAKIP serta belum memadainya infrastruktur pendukung, seperti sistem informasi manajemen yang terintegrasi, semakin memperburuk situasi. Temuan ini sejalan dengan laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tahun 2022 yang menunjukkan bahwa sektor kesehatan daerah masih mendominasi kategori akuntabilitas rendah, dengan skor rata-rata nilai SAKIP di bawah 60.

Strategi Untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Sistem Kesehatan

Partisipasi masyarakat merupakan kunci penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem kesehatan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, perencanaan, dan evaluasi program, penyelenggara layanan kesehatan terdorong untuk lebih terbuka, bertanggung jawab, serta responsif terhadap kebutuhan nyata. Salah satu strategi untuk memperkuat partisipasi ini adalah melalui digitalisasi layanan kesehatan, khususnya dengan penerapan sistem e-Procurement, yaitu proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam e-Procurement, terdapat mekanisme e-Purchasing, yaitu tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-Catalogue) yang memuat daftar produk, harga, jenis, serta spesifikasi teknis dari penyedia yang telah terverifikasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem ini bertujuan menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel (Pambudi, 2024). Menurut laporan LKPP tahun 2023, implementasi e-Procurement di sektor kesehatan berhasil menghemat anggaran belanja pemerintah hingga Rp5,7 triliun secara nasional melalui mekanisme e-Purchasing dan e-Catalogue (Dwi Purwanto & Toening Winarni, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Primastiwi, Wardani, dan Hanisah (2020), yang menunjukkan bahwa keberadaan sistem e-Procurement berpengaruh positif secara signifikan terhadap pencegahan penipuan dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pengadaan barang dan jasa sektor kesehatan (Primastiwi, Wardani, & Hanisah, 2020). Implementasi e-Procurement di

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng juga terbukti memperbaiki tata kelola pengadaan alat kesehatan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional (Wijayanti & Ardana, 2021). Dengan penggunaan aplikasi e-Purchasing, proses pengadaan menjadi lebih transparan dan akuntabel karena sistem ini menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Hal ini memastikan bahwa pengadaan alat kesehatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan keuangan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan anggaran (Lesmana, Oktamaria Sihole, & Wasir, 2024).

Oleh karena itu, penerapan e-Procurement melalui mekanisme seperti e-Purchasing menjadi strategi penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pengadaan alat kesehatan dan obat. Dengan penerapan teknologi ini, pengadaan barang tidak hanya menjadi lebih efisien dan tepat sasaran, tetapi juga memungkinkan semua pihak baik pemerintah, rumah sakit, maupun masyarakat untuk lebih mudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran kesehatan (Darmawan, 2022). Peningkatan keterbukaan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan dan memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan secara optimal dan bertanggung jawab.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan kebijakan, koordinasi lintas sektor yang terbatas, dan pemahaman akuntabilitas yang rendah merupakan hambatan utama dalam tata kelola sistem kesehatan Indonesia. Implementasi e-Procurement terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi, sementara partisipasi masyarakat memperkuat akuntabilitas pelayanan. Reformasi tata kelola kesehatan harus difokuskan pada penguatan SDM, integrasi teknologi informasi secara berkelanjutan, dan peningkatan literasi kesehatan. Pemerintah dan penyedia layanan diharapkan memperluas ruang partisipatif publik dalam evaluasi layanan. Dengan langkah strategis ini, sistem kesehatan Indonesia dapat bergerak menuju model tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta atas bimbingan dan arahnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman sekelas atas saran dan dukungan dalam proses penulisan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Andayani, S. A., Setiawati, B., & Haerana. (2020). Akuntabilitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang di Kabupaten Maros. *KIMAP: Kajian Ilmiah Administrasi Publik*, 1.
- Annisa, R., Winda, S., Dwisaputro, E., Isnaini, K. N., & Korupsi, K. P. (2020). Mengatasi defisit dana jaminan sosial kesehatan melalui perbaikan tata kelola. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 209–224. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.664>
- Ayuningtyas, D., Parinduri, S. K., Susanti, F., & Aryani. (2018). Integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan (Vol. 4).
- Bintang, M. (2024). Pengaruh korupsi dalam pelayanan kesehatan terhadap implementasi Pancasila. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 4(1).
- Darmawan, S. A. (2022). Penetapan HPS e-purchasing: Tinjauan akuntabilitas dan mekanisme pasar. *JPBJ*, 1. Retrieved from <https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj>
- Dwi Purwanto, E., & Toening Winarni, A. (2021). Analisis implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) pada sektor kesehatan dalam e-procurement secara e-catalog guna mendorong utilisasi produk dalam negeri dan mewujudkan Indonesia yang mandiri. *Jurnal Media Administrasi*, 6(2).
- Fukami, T. (2024). Enhancing healthcare accountability for administrators: Fostering transparency for patient safety and quality enhancement. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.66007>
- Juwita, R. (2023). Understanding the typology of health sector corruption in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 13(1), 17–35. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n1.5>
- Latief, H., Asri, S., & Santosa, A. (2023). Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Paser. *Journal Publicuho*, 5(4), 1367–1376. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.83>
- Lesmana, A. E., Oktamaria Sihole, P., & Wasir, R. (2024). Meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan: Strategic purchasing dalam program jaminan kesehatan nasional di Indonesia. 5(2).
- Lestari, S. F. (2024). Analisis akuntabilitas dan efektivitas anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). *Jurnal Ekonomi Revolusioner*.
- Melita, K., Lengkong, F., & Plangiten, N. (2019). Pengaruh transparansi kerja terhadap kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Mimika.
- Nurimansjah, R. A., & Kamal, K. (2022). Transparansi informasi pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kota Palopo. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 5. Retrieved from <https://Palopopos.fajar.co.id>
- Pambudi, R. D. (2024). Enhancing procurement efficiency through e-purchasing methods. *Pusat Publikasi dan Penebitan Yayasan Al Ma'arif Dawuhan*, 1(1). <https://doi.org/10.1016/ger.2023.01.012>

- Primastiwi, A., Wardani, D. K., & Hanisah, H. (2020). Pengaruh penerapan e-procurement dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa di sektor publik. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 6(1), 30–36. <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.76>
- Rokhmawan, U. R., Yudha Hernoko, A., & Khoirul Huda, D. M. (2017). Analisis hukum pengadaan obat BPJS secara elektronik (e-purchasing). *Medica Majapahit*, 9, 84.
- Sulfiani, A. N., & Reski, K. (2019). Akuntabilitas dan transparansi pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sulistiyani, L., Mulyadi, & Sutanto, E. M. (2014). Peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan manajemen melalui model audit dana rumah sakit untuk pengelolaan keuangan rumah sakit.
- Wijayanti, P. A., & Ardana, D. M. J. (2021). Implementasi electronic procurement dalam upaya perbaikan tata kelola pengadaan alat kesehatan di RSUD Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 13.
- Yulianti, Y., & Terzaqi, M. T. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 3466. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i3.4418>